



**Penguatan Peran Penyimbang Adat dalam Pelayanan bagi
Kesejahteraan Masyarakat Adat Buwai Khunjung di Pekon Maja,
Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan**

Damar Wibisono^{1*}, Suwarno², Pairul Syah³, Yuni Ratna Sari⁴, Dewi Ayu Hidayati⁵,
Ifaty Fadliliana Sari⁶, Erna Rochana⁷
^{1,2,3,4,5,6,7} Jurusan Sosiologi Universitas Lampung

*e-mail: damar.wibisono@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat peran Penyimbang Adat dalam pelayanan bagi kesejahteraan Masyarakat Adat Buwai Khunjung, Sekretariat Pusat Pekon Maja, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Struktur pemerintahan adat Saibatin di wilayah ini masih menghadapi persoalan berupa lemahnya pemahaman sebagian Penyimbang Adat terhadap perannya, stagnasi pembaharuan struktur kelembagaan adat, serta rendahnya efektivitas peran penyimbang dalam mendorong kesejahteraan ekonomi warga adat. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan sosiologis dengan tahapan observasi dan wawancara pendahuluan, brainstorming dan focus group discussion (FGD), serta sosialisasi dan pelatihan yang disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, dan simulasi kepada 15 tokoh adat dan masyarakat di Pekon Maja. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman peserta, dilengkapi evaluasi dampak melalui kuesioner. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai kepemimpinan pemerintahan adat, fungsi dan peran kepala pemerintahan adat, serta peranan penyimbang dalam pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat adat, dengan rata-rata nilai meningkat dari 62,67 pada pre-test menjadi 76,00 pada post-test, atau naik sebesar 13,33%. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi melalui keterlibatan aktif dalam diskusi dan simulasi. Kegiatan ini memberikan kontribusi berupa penguatan pemahaman kolektif mengenai model ideal struktur pemerintahan adat yang dapat direplikasi pada komunitas adat Saibatin lain di Provinsi Lampung, sekaligus menjadi dasar bagi keberlanjutan program pendampingan kelembagaan adat berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Penyimbang Adat; kepemimpinan adat; kesejahteraan masyarakat adat; pemberdayaan masyarakat; hukum adat Lampung Saibatin

ABSTRACT

This community service activity aims to strengthen the role of the Penyimbang Adat (traditional leaders) in delivering services for the welfare of the Buwai Khunjung Indigenous Community at the Central Secretariat of Pekon Maja, Kalianda Subdistrict, South Lampung. The Saibatin traditional governance structure in this area still faces problems, including the limited understanding of some Penyimbang Adat regarding their roles, stagnation in the renewal of the customary institutional structure, and the low effectiveness of the penyimbang's role in promoting the economic welfare of indigenous communities. The activity was carried out through a sociological approach involving preliminary observation and interviews, brainstorming and focus group discussion (FGD), as well as socialization and training delivered through lectures, discussions, and simulations to 15 traditional leaders and community members in Pekon Maja. Evaluation was conducted using pre-test and post-test instruments to measure changes in participants' understanding, complemented by an impact evaluation through questionnaires. The results showed an increase in participants' understanding of customary governance leadership, the functions and roles of traditional government heads, and the role of the penyimbang in services for indigenous community welfare, with the average score increasing from 62.67 in the pre-test to 76.00 in the post-test, or a 13.33% increase. Participants also demonstrated strong enthusiasm through active involvement in discussions and simulations. This activity contributes to strengthening collective understanding of an ideal model of customary governance structure that can be replicated in other Saibatin indigenous communities in

Lampung Province, while also providing a foundation for the sustainability of local-wisdom-based customary institutional mentoring programs.

Keywords: *Penyimbang Adat; customary leadership; indigenous community welfare; community empowerment; Lampung Saibatin customary law*

PENDAHULUAN

Kebudayaan, sebagaimana ditegaskan Abdulsyani (2007), merupakan hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal manusia yang diwariskan secara turun-temurun dan mencakup sistem kepercayaan, adat istiadat, bahasa, serta karya sosial masyarakat. Kebudayaan bersifat progresif dan berfungsi sebagai strategi manusia untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya (Peursen, 1989). Salah satu wujud konkret dari kebudayaan tersebut adalah kelembagaan pemerintahan adat, yang di Provinsi Lampung dikenal dalam dua sistem besar, yaitu adat Saibatin yang bercorak aristokratis-hierarkis dan adat Pepadun yang bercorak demokratis-egaliter (Franjaya et al., 2023).

Pada masyarakat adat Saibatin, kepemimpinan dijalankan oleh Penyimbang Adat yang menempati struktur hierarkis mulai dari Penyimbang Marga (Pengiran), Dalam, Karya, Temunggun, Batin, Radin, Raja, hingga Minak dan Mas pada tingkat kelompok pelambanan. Struktur ini secara fungsional memiliki kemiripan dengan hierarki pemerintahan formal, mulai dari tingkat pusat hingga rukun tetangga, sehingga Penyimbang Adat pada dasarnya menjalankan fungsi kepemimpinan, mediasi, dan pelayanan yang setara dengan aparatur pemerintahan formal, namun bersandar pada legitimasi adat dan garis keturunan (Soepomo, 1979; Ndraha, 2011).

Secara konseptual, peranan merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan; seseorang menjalankan peranan apabila ia melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang disandangnya (Soekanto, 2002). Peranan Penyimbang Adat dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya dalam struktur kepenyimbangan, yang mencakup fungsi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, fungsi mediasi dan penyelesaian sengketa, fungsi pelestarian nilai dan kearifan lokal, hingga fungsi penggerak kesejahteraan ekonomi warga adat. Kepemimpinan itu sendiri dipahami sebagai relasi pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin, yang berkembang melalui interaksi timbal balik guna mencapai tujuan bersama (Kartono, 2010; Rivai & Mulyadi, 2013).

Secara empiris, Pekon Maja di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah yang menaungi Masyarakat Adat Buwai Khunjung dengan Sekretariat Pusat Lamban Balak Kemandaran Marga Legun. Pada kenyataannya, masih terdapat Penyimbang Adat yang belum sepenuhnya memahami cakupan perannya secara utuh. Struktur pemerintahan adat belum mengalami pembaharuan yang memadai untuk merespons dinamika sosial kontemporer, sehingga kepala pemerintahan adat mengalami kesulitan dalam menyaring pengaruh budaya luar sekaligus menjaga model khas struktur pemerintahan adat setempat. Rutinitas kegiatan hippun adat dan fungsi Lamban Balak sebagai pusat musyawarah dan ragam upacara turut mengalami penurunan intensitas, sementara secara ekonomi tingkat kesejahteraan warga adat masih tergolong lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan Penyimbang Adat belum berfungsi secara optimal dalam mendorong kesejahteraan warga yang menjadi salah satu mandat utamanya.

Kajian-kajian terdahulu mengenai masyarakat adat Lampung Saibatin selama ini lebih banyak berfokus pada aspek tradisi perkawinan, simbolisme upacara adat, dan

pelestarian identitas budaya dalam konteks tata ruang maupun pariwisata (Franjaya et al., 2023). Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah peranan fungsional Penyimbang Adat dalam pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat adat, terutama melalui pendekatan intervensi pengabdian, masih relatif terbatas. Studi pemberdayaan masyarakat adat pada umumnya juga lebih banyak menyasar aspek ekonomi produktif secara langsung dan belum banyak mengintegrasikan penguatan kapasitas kepemimpinan adat sebagai basis keberlanjutan kesejahteraan (Rahmahdillah et al., 2026). Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting bagi kegiatan pengabdian ini, yaitu menghubungkan penguatan kapasitas kepemimpinan adat dengan upaya kesejahteraan masyarakat secara terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini memiliki urgensi untuk memperjelas kembali struktur dan fungsi kepenyimbangan adat agar pemerintahan adat dapat menjalankan tugas dan perannya secara lebih efektif, khususnya dalam mendorong kesejahteraan warga Adat Buwai Khunjung. Kebaruan (novelty) dari kegiatan ini terletak pada pendekatan sosiologis yang memadukan penguatan pemahaman struktural kepenyimbangan dengan penajaman peran fungsional penyimbang dalam pelayanan kesejahteraan, sesuatu yang belum banyak disentuh oleh kajian maupun program pengabdian sebelumnya pada komunitas adat Saibatin. Kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi berupa model penguatan kelembagaan adat yang dapat direplikasi pada komunitas adat serupa di Provinsi Lampung.

Secara umum, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memperkuat peranan Penyimbang Adat dalam pelayanan bagi kesejahteraan Masyarakat Adat Buwai Khunjung Sekretariat Pusat Pekon Maja, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan memperjelas struktur pemerintahan adat setempat agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara lebih baik, sekaligus meningkatkan pemahaman tokoh adat dan masyarakat mengenai model ideal kepemimpinan dan pelayanan adat berbasis kesejahteraan.

METODE

Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pekon Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai pusat Sekretariat Masyarakat Adat Buwai Khunjung. Kegiatan berlangsung selama enam bulan dengan pelaksanaan puncak berupa sosialisasi dan pelatihan pada tanggal 24 Juni 2022, pukul 15.30–23.30 WIB.

Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan adalah para pemimpin formal maupun pimpinan informal di Pekon Maja, yang meliputi Penyimbang Adat, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan unsur lembaga swadaya masyarakat, dengan jumlah peserta yang terlibat aktif sebanyak 15 orang. Sasaran ini dipilih karena posisi strategis mereka sebagai pemegang legitimasi adat sekaligus aktor kunci dalam pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat adat setempat.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan menempuh empat tahapan utama. Pertama, tahap prapengabdian berupa studi pendahuluan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara sederhana terhadap kondisi kelembagaan adat di lokasi kegiatan. Kedua, tahap identifikasi masalah melalui brainstorming dan focus group discussion (FGD) bersama tokoh adat untuk memetakan permasalahan struktur dan fungsi kepenyimbangan. Ketiga, tahap sosialisasi dan pelatihan yang disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, dan simulasi di dalam ruangan, dengan materi meliputi kepemimpinan pemerintahan adat, fungsi kepala pemerintahan adat, peran kepala pemerintahan adat, serta peranan penimbang dalam pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat adat. Keempat, tahap pendampingan lapangan yang dilakukan tim pelaksana melalui kontrol pada setiap tahapan kegiatan serta evaluasi pada akhir implementasi.

Teknik Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui dua pendekatan. Evaluasi perubahan pengetahuan dilakukan dengan pre-test dan post-test, di mana selisih antara nilai post-test dan pre-test dinyatakan dalam persentase kenaikan pemahaman. Evaluasi dampak dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan menjelang akhir kegiatan untuk mengukur proporsi peserta yang telah menguasai materi dengan baik dalam konteks pelaksanaan tugasnya sebagai Penimbang Adat.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan diukur melalui tiga indikator, yaitu: (1) peningkatan nilai rata-rata pemahaman peserta dari pre-test ke post-test; (2) tingkat partisipasi dan antusiasme peserta dalam sesi diskusi dan simulasi; serta (3) kejelasan struktur dan fungsi kepenyimbangan adat yang dipahami bersama oleh peserta sebagai acuan pelaksanaan tugas ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2022 di Pekon Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dan diikuti oleh Penimbang Adat serta tokoh masyarakat setempat. Rangkaian kegiatan disusun secara sistematis mulai dari registrasi peserta, evaluasi awal, penyampaian materi secara bertahap, hingga evaluasi akhir dan penutupan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan

No	Waktu	Kegiatan	Pelaksana
1	15.30–15.45	Registrasi peserta dan pembukaan	Tim Pelaksana
2	15.45–16.00	Evaluasi awal (pre-test)	Tim Pelaksana
3	16.00–17.30	Materi I: Kepemimpinan Pemerintahan Adat	Drs. Suwarno, M.H.
4	17.30–18.30	Ishoma	Panitia
5	18.30–20.00	Materi II: Fungsi Kepala Pemerintahan Adat	Damar Wibisono, S.Sos., M.A.
6	20.00–21.30	Materi III: Peran Kepala Pemerintahan Adat	Drs. Pairulsyah, M.H.

No	Waktu	Kegiatan	Pelaksana
7	21.30–23.00	Materi IV: Peranan Penyimbang dalam Pelayanan bagi Kesejahteraan Masyarakat Adat	Drs. Abdul Syani, M.I.P.
8	23.00–23.15	Evaluasi akhir (post-test)	Tim Pelaksana
9	23.15–23.30	Penutupan	Panitia

Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana Pengabdian

Penyampaian materi dilakukan secara bertahap oleh masing-masing narasumber dengan metode ceramah yang dipadukan diskusi dan simulasi, sehingga peserta tidak hanya menerima pengetahuan secara teoretis, tetapi juga memperoleh kesempatan mempraktikkan pemahamannya melalui simulasi peran. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa kepemimpinan berkembang melalui interaksi timbal balik antara pemimpin dan yang dipimpin, bukan semata transfer pengetahuan searah (Kartono, 2010). Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa sebagian peserta, khususnya penyimbang pada tingkat kelompok pelambanan, masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai batas kewenangan dan tanggung jawabnya, sehingga dalam praktiknya peran tersebut cenderung tumpang tindih dengan peran pemimpin formal desa.

B. Struktur dan Peranan Penyimbang Adat dalam Pemerintahan Adat Buwai Khunjung

Pemerintahan Adat Buwai Khunjung di Pekon Maja memiliki struktur hierarkis yang terdiri atas Pengiran sebagai pucuk pimpinan, diikuti oleh Dalom, Karya, dan Temunggun pada tingkat kebuwaian, serta Batin, Radin, Raja, hingga Minak dan Mas pada tingkat tiyuh dan kelompok pelambanan. Struktur ini secara fungsional memiliki kemiripan dengan hierarki pemerintahan formal, mulai dari tingkat pusat hingga rukun tetangga, sehingga keberadaannya berpotensi menjadi mitra strategis pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat apabila fungsi dan kewenangannya dipahami secara jelas oleh setiap pemangku gelar adat (Soepomo, 1979; Ndraha, 2011).

Hasil sosialisasi mengidentifikasi bahwa peranan Penyimbang Adat pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam lima klaster fungsi utama. Pertama, fungsi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, yaitu memimpin pemerintahan adat secara arif dan bijaksana serta berkeadilan dalam penerapan hukum adat. Kedua, fungsi mediasi dan penyelesaian sengketa, mencakup penyediaan fasilitas dan mediasi dalam hippun (musyawarah) untuk menyelesaikan perselisihan sosial ekonomi warga secara adil. Ketiga, fungsi pelestarian nilai dan kearifan lokal, meliputi pemeliharaan benda-benda pusaka, kesenian khas, dan tradisi kebuwaian sebagai aset budaya sekaligus potensi wisata budaya. Keempat, fungsi penggerak ekonomi dan kesejahteraan warga, antara lain membimbing warga dalam usaha pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, dan perdagangan berbasis kearifan lokal. Kelima, fungsi pelayanan sosial dan fasilitasi pembangunan, termasuk mendorong gotong royong dalam pembangunan fasilitas umum serta menjalin kerja sama dengan pemimpin formal desa.

Pengelompokan fungsi tersebut memperkuat pemahaman bahwa peranan bukan sekadar hak dan kewajiban normatif, melainkan juga perilaku sosial nyata dari pemegang kedudukan yang dijalankan sebagai bagian dari aktivitas kolektif dalam masyarakat (Soekanto, 2002). Dengan demikian, penguatan peran Penyimbang Adat perlu menyentuh

keempat klaster fungsi secara simultan, bukan hanya pada aspek seremonial-kultural, agar kontribusinya terhadap kesejahteraan warga adat dapat dirasakan secara konkret.

C. Peningkatan Pemahaman Peserta terhadap Peranan Penyimbang Adat

Evaluasi terhadap efektivitas kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test kepada 15 peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh peserta mengalami peningkatan atau setidaknya mempertahankan pemahamannya setelah mengikuti sosialisasi dan pelatihan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pre-test dan Post-test Peserta Kegiatan

No. Peserta	Nilai Pre-test	Nilai Post-test	Kenaikan (%)
1	70	80	10
2	60	80	20
3	60	70	10
4	70	80	10
5	70	90	20
6	60	70	10
7	70	80	10
8	50	70	20
9	60	80	20
10	60	70	10
11	70	70	0
12	60	80	20
13	60	70	10
14	60	80	20
15	60	70	10
Rata-rata	62,67	76,00	13,33

Sumber: Data primer hasil evaluasi kegiatan pengabdian

Berdasarkan Tabel 2, nilai rata-rata peserta meningkat dari 62,67 pada saat pre-test menjadi 76,00 pada saat post-test, atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 13,33%. Peningkatan tertinggi mencapai 20% dialami oleh enam peserta, sementara satu peserta tidak menunjukkan perubahan nilai, yang mengindikasikan bahwa peserta tersebut telah memiliki pemahaman awal yang relatif memadai mengenai kepemimpinan pemerintahan adat sebelum kegiatan berlangsung. Secara keseluruhan, pola peningkatan ini menunjukkan bahwa materi yang diberikan dapat diserap dengan baik oleh sebagian besar peserta, khususnya pada aspek kepemimpinan pemerintahan adat, fungsi dan peran kepala pemerintahan adat, serta peranan penyimbang dalam pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat adat.

Temuan ini sejalan dengan hasil kegiatan pengabdian sejenis pada komunitas berbeda. Nurdin et al. (2026), dalam kegiatan penguatan peran dan fungsi posyandu berbasis pendekatan sosial budaya di Kecamatan Panton Reu, Aceh Barat, juga

melaporkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, dari rata-rata 7,3 menjadi 9,6 pada skala nilai yang berbeda. Kesamaan pola pada dua kegiatan pengabdian dengan konteks yang berbeda ini memperkuat argumen bahwa pendekatan sosial budaya dan partisipatif, yang menekankan ceramah dipadukan diskusi dan simulasi, secara umum efektif dalam meningkatkan pemahaman kelompok sasaran terhadap materi yang bersifat kelembagaan maupun teknis kesehatan. Selain itu, temuan ini turut menguatkan hasil kajian Rahmahdillah et al. (2026) bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat adat sangat ditentukan oleh sejauh mana pendekatan yang digunakan mampu mengakomodasi partisipasi aktif dan pengalaman lokal warga, bukan sekadar transfer pengetahuan yang bersifat top-down.

Selain peningkatan hasil evaluasi kognitif, keberhasilan kegiatan juga tampak dari antusiasme dan keterlibatan aktif peserta dalam sesi diskusi dan simulasi peran. Peserta secara aktif mengajukan pertanyaan mengenai batas kewenangan antar-tingkat kepenyimbangan serta menyampaikan pengalaman konkret dalam menjalankan tugas penyelesaian sengketa dan mediasi warga. Partisipasi aktif tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya menjadi objek penyuluhan, tetapi turut menjadi subjek yang mengonstruksi ulang pemahamannya tentang struktur dan fungsi kepenyimbangan adat, sejalan dengan prinsip bahwa kepemimpinan berkembang melalui relasi dan interaksi timbal balik, bukan pengaruh satu arah (Rivai & Mulyadi, 2013).

D. Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Implikasi Kegiatan

Beberapa faktor pendukung teridentifikasi selama pelaksanaan kegiatan, antara lain legitimasi sosial yang kuat dari Penyimbang Adat di mata warga, kesediaan waktu peserta yang cukup panjang dalam satu rangkaian acara, serta dukungan sarana berupa fasilitas ruangan dan peralatan simulasi yang memadai. Adapun faktor penghambat yang muncul di lapangan meliputi keterbatasan dokumentasi tertulis mengenai struktur dan kewenangan kepenyimbangan pada generasi muda pemegang gelar adat, serta belum optimalnya forum reguler hippun adat sebagai wadah pembaruan pemahaman kelembagaan secara berkelanjutan.

Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa penguatan peran Penyimbang Adat tidak dapat dilakukan secara satu kali (*one-shot intervention*), melainkan memerlukan mekanisme pendampingan berkelanjutan yang terintegrasi dengan forum-forum adat yang sudah ada. Kegiatan pengabdian semacam ini idealnya diikuti dengan pendokumentasian struktur dan kewenangan kepenyimbangan secara tertulis, sehingga pengetahuan kelembagaan adat tidak semata bergantung pada transmisi lisan antargenerasi, tetapi juga dapat diwariskan secara lebih sistematis kepada Penyimbang Adat generasi berikutnya.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penguatan peran Penyimbang Adat dalam pelayanan bagi kesejahteraan Masyarakat Adat Buwai Khujung di Pekon Maja, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan mampu memperjelas struktur dan fungsi kepenyimbangan adat sekaligus meningkatkan pemahaman peserta secara terukur, sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan nilai rata-rata pre-test dari 62,67 menjadi 76,00 pada post-test, atau meningkat sebesar 13,33%. Peningkatan pemahaman tersebut mencakup aspek kepemimpinan pemerintahan adat, fungsi dan peran kepala pemerintahan adat, serta peranan penyimbang dalam pelayanan bagi kesejahteraan

masyarakat adat, yang dapat dipetakan ke dalam lima klaster fungsi: kepemimpinan, mediasi, pelestarian budaya, penggerak ekonomi, dan pelayanan sosial.

Kegiatan ini memberikan kontribusi berupa model penguatan kelembagaan adat berbasis pendekatan sosial budaya yang dapat direplikasi pada komunitas adat Saibatin lain di Provinsi Lampung. Sebagai rekomendasi, diperlukan program pendampingan berkelanjutan yang terintegrasi dengan forum hippun adat, disertai pendokumentasian tertulis mengenai struktur dan kewenangan kepenyimbangan, serta penguatan sinergi antara Penyimbang Adat, pemerintah desa, dan perguruan tinggi dalam mendorong kesejahteraan Masyarakat Adat Buwai Khunjung secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2007). Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan. Bumi Aksara.
- Franjaya, E., Sitompul, R. A., Satria, W. D., Wijaya, P. G. W., & Hesty, R. S. (2023). Budaya Pepadun dan Saibatin dalam rencana pengembangan taman di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(1), 15–32. <https://doi.org/10.14710/pwk.v19i1.40539>
- Kartono, K. (2010). Pemimpin dan kepemimpinan. PT Raja Grafindo Persada.
- Muslimah, B. A. (2015). Peranan kepemimpinan kepala pemerintahan adat dalam upaya pelestarian budaya Lampung Saibatin [Skripsi, Universitas Lampung].
- Ndraha, T. (2011). Kybernology (ilmu pemerintahan baru). Rineka Cipta.
- Nurdin, B. V., Yulianto, Hartoyo, Duadji, N., & Salsabila, Z. (2026). Pelatihan penguatan peran dan fungsi posyandu dalam rangka ketahanan kesehatan keluarga di Kecamatan Panton Reu, Aceh Barat. *Nengah Nyappur: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 36–45.
- Notowidagdo, R. (1996). Ilmu budaya dasar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. PT Raja Grafindo Persada.
- Peursen, C. A. van. (1989). Strategi kebudayaan (Edisi ke-2). Kanisius.
- Rahmahdillah, I., Rahmatia, C., Putri, A. R. E., & Widiarti, D. Y. (2026). Efektifitas pemberdayaan masyarakat adat di Desa Dwi Karya Bakti, Kabupaten Muaro Bungo. *Jurnal Abdimas UM Jambi*, 3(1), 143–147. <https://doi.org/10.53978/jaum.v3i1.725>
- Rivai, V., & Mulyadi, D. (2013). Kepemimpinan dan perilaku organisasi. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2002). Teori peranan. Bumi Aksara.
- Soepomo. (1979). Hukum adat. Pradnya Paramita.
- Sumendra, W. (2013, 25 Agustus). Kearifan lokal (budaya 3). <http://wayansumendra.wordpress.com/2013/08/25/kearifan-lokal-budaya-3>